

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 menyatakan bahwa pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan.

Pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara pada dasarnya merupakan interaksi dari berbagai kelompok variabel, antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi dan lain-lain. Indonesia sebagai sebuah negara dimana pembangunan nasionalnya pada hakikatnya memiliki salah satu tujuan yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah

tersebut berkembang dengan baik. Selain pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara adalah kesempatan kerja. Adanya kesempatan kerja ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan terhadap tenaga kerja di pasar tenaga kerja (*demand for labour force*), oleh karena itu kesempatan kerja sama dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia di dunia kerja. Tentunya semakin meningkat kegiatan pembangunan akan semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini menjadi sangat penting karena semakin besar kesempatan kerja bagi tenaga kerja maka kemajuan kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin baik, dan sebaliknya.

Boediono (1999) menyatakan bahwa dari sudut pandang ekonomi makro, perluasan kesempatan kerja dapat terjadi melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita secara konstan dalam jangka panjang. Peningkatan output merupakan akibat dari peningkatan aktivitas produksi secara keseluruhan. Peningkatan aktivitas produksi merupakan bagian dari sisi penawaran perluasan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja akan terjadi bila sisi permintaan juga mengalami peningkatan dengan kata lain, kesempatan kerja akan tercipta bila terjadi peningkatan pada sisi permintaan dan penawaran agregat.

Tabel 1.1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesempatan Kerja di
Provinsi Jawa Timur tahun 2007-2011

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Kesempatan Kerja
2007	6,11%	93,21%
2008	5,94%	93,58%
2009	5,01%	94,92%
2010	6,68%	95,75%
2011	7,22%	95,84%

Sumber: BPS Provinsi Jatim, 2007-2011

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur berada pada angka 6,11% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008 sebesar 0,17%. Krisis ekonomi dunia pada tahun 2008 berimbas terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk Jawa Timur sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi 2009 menjadi sebesar 5,01%. Namun pada tahun 2010 terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,67% menjadi 6,68% dan pada tahun 2011 menjadi sebesar 7,22%. Selama periode 2007 hingga 2011 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur cenderung fluktuatif. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi tingkat kesempatan kerja di Jawa Timur yang setiap tahunnya mengalami kenaikan selama periode 2007 hingga 2011 meskipun perekonomian mengalami penurunan namun tingkat kesempatan kerja selalu mengalami peningkatan.

Tabel 1.2
Perbandingan Tingkat Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Timur dengan
Provinsi Lainnya

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011
Jawa Timur	93, 21%	93,58%	94,92%	95,75%	95,84%
Bali	96,23%	96,69%	96,87%	96,94%	97,68%
Papua	94,99%	95,61%	95,92%	96,45%	96,06%
Kalimantan Tengah	94,89%	95,41%	95,38%	95,86%	97,45%

Sumber :BPS Provinsi Jatim, 2007-2011

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa selama periode 2007-2011, tingkat kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Bali, Papua, dan Kalimantan Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesempatan kerja di Jawa Timur masih perlu ditingkatkan lagi.

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah tingkat PDRB yang merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur bersama masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari besaran angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa timur, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000. Selama kurun waktu 2007-2011, PDRB Jawa Timur selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. (BPS Jatim, 2012).

Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur
Periode 2007-2011 (Rupiah)

Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK
2007	536.981.881.910.000	288.404.312.280.000
2008	621.391.674.610.000	305.538.686.620.000
2009	686.847.557.720.000	320.861.168.910.000
2010	778.565.772.460.000	342.280.765.510.000
2011	884.143.574.810.000	366.984.301.200.000

Sumber: BPS Provinsi Jatim, 2007-2011

Dalam realitanya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Output yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya

peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja yang diminta sehingga tingkat kesempatan kerja pun ikut mengalami peningkatan.

BPS Jatim (2012) menyatakan bahwa penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu wilayah, termasuk Jawa Timur. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, jumlah penduduk Jawa Timur selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama 2007-2011, seperti terlihat seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1.4
Komposisi Penduduk Jawa Timur Periode 2007-2011 (Jiwa)

Tahun	Total Jumlah Penduduk	Jumlah Angkatan Kerja
2007	37.291.102	20.178.590
2008	38.412.548	20.239.256
2009	38.975.046	20.338.568
2010	40.054.049	19.527.051
2011	40.903.400	19.761.886

Sumber: BPS Provinsi Jatim, 2007-2011

Simanjuntak (2001) menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mempengaruhi kesempatan kerja. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka akan mengurangi tingkat kesempatan kerja dan sebaliknya semakin rendah pertumbuhan penduduk maka tingkat kesempatan kerja akan meningkat. Selanjutnya tingkat upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditentukan, maka sangat berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Akibatnya, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai tindakan efisiensi, yang berakibat pada rendahnya jumlah angkatan kerja yang bekerja. Sehingga diduga tingkat upah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap jumlah angkatan kerja

yang bekerja. Upah merupakan wujud nyata dari sebuah bentuk pertukaran yang terjadi antara pengguna jasa dan pemberi jasa. Upaya meminimalisasi persoalan upah minimum dilakukan pemerintah dengan menyusun rumusan upah minimum yang diharapkan menjadi acuan bagi pengusaha agar memenuhi kewajibannya membayar upah buruh atau pekerja untuk dapat hidup layak dari upah yang diterimanya. Dengan berlakunya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka keputusan UMK untuk tiap kabupaten atau kota madya langsung dibuat oleh gubernur atas rekomendasi para bupati dan walikota yang berada di provinsi masing-masing.

Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang:

”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja di Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur Periode 2007-2011”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kesempatan kerja di kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Timur periode 2007-2011?
2. Bagaimana pengaruh variabel pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kesempatan kerja di kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Timur periode 2007-2011?

3. Bagaimana pengaruh variabel tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) riil terhadap tingkat kesempatan kerja di kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Timur periode 2007-2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kesempatan kerja di kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Timur periode 2007-2011.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kesempatan kerja di kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Timur periode 2007-2011.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) riil terhadap tingkat kesempatan kerja di kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Timur periode 2007-2011.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Sebagai acuan skripsi bagi mahasiswa yang mengambil tema dan penelitian yang sama.
2. Sebagai bahan pembandingan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang, tentunya dengan analisis yang lebih baik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai masukan/input bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam mengambil keputusan mengenai rencana peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
2. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan pihak-pihak yang berkaitan dengan ketenagakerjaan agar dapat menentukan kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan dan Saran.

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Meguraikan landasan teori, hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan mencoba untuk menarik suatu hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Menguraikan analisis deskriptif dan objek penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari penelitian.